

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PROGRAM LORONG WISATA
DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan usulkan oleh:

MUH. NURFAUZI IKSAN

105641106218



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

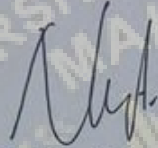
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektivitas Program Lorong Wisata di Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Muh. Nurfauzi Iksan
Nomor Stambuk : 105641106218
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

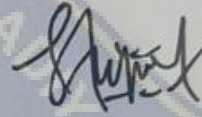
Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si



Hamrun, S.IP., M.Si

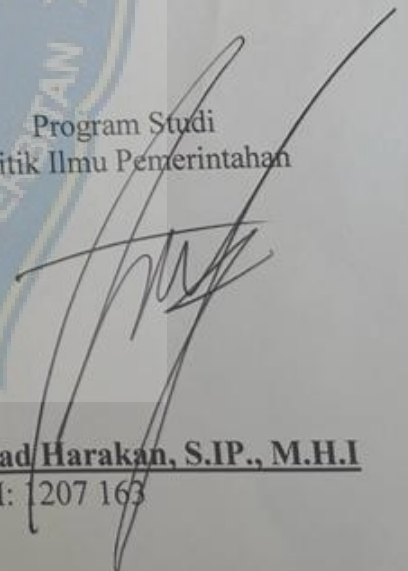
Mengetahui,

Dekan Ketua
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Program Studi
Politik Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727



Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM: 1207 163

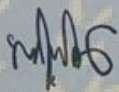
HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0175/FSP/A.4-II/VIII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu 16 Agustus 2023.

Mengetahui :

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727



Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM : 992797

Tim Penguji :

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
2. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
3. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si
4. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I


()

()

()

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh. Nurfauzi Iksan

Nomor Stambuk : 105641106218

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 25 Juni 2023

Yang Menyatakan, 5

Muh. Nurfauzi Iksan

ABSTRAK

MUH. NURFAUZI IKSAN.2023. Efektivitas Program Lorong Wisata di Kota Makassar. Dibimbing oleh Nur Wahid dan Hamrun

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemerintahan Kota Makassar pada program lorong wisata di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menganalisis jawaban dari informan yang berjumlah 5 orang yang diwawancarai kemudian menarik kesimpulan akhir dari hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program lorong wisata dinilai bagus dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lorong-lorong yang ada di Kota Makassar, namun kurangnya pendidikan sebagian masyarakat diberbagai lorong mempengaruhi keikutsertaan mereka dalam mensukseskan program, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Pemerintahan Kota Makassar mulai melakukan sebuah langkah pembenahan yang secara signifikan untuk mengatasi masalah lingkungan Kota Makassar sendiri adalah ruang yang sempit karena sebagian besar masyarakat bermukim di kawasan lorong. Upaya pengembangan program lorong wisata melibatkan berbagai komponen, elemen atau unsur di dalamnya yang saling terintegrasi dan berpengaruh terhadap keberlanjutannya. Strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan program lorong wisata yaitu pendekatan berdasarkan dimensi keberlanjutan pengembangannya. Program lorong wisata di Kota Makassar memberikan dampak positif/baik akan manfaat yang telah dirasakan oleh berbagai pihak, sehingga program ini perlu diterapkan dengan baik melalui dukungan pemerintah setempat dan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perubahan lingkungan (lorong) yang dulunya kumuh, bau, sampah bertebaran dimana-mana, sekarang dengan adanya program lorong wisata lingkungan berubah menjadi bersih, indah dipandang dan produktif.

Kata Kunci: Efektivitas, Lorong Wisata, Kota Makassar.

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan taufik-Nya jualah sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Program Lorong Wisata di Kota Makassar” dapat diselesaikan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga terkhusus kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Hamrun, S.IP., M.Si sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Semoga Allah SWT menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa medoakan dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof.Dr.H.Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Ahmad Harakan, S.IP.,M.H.I selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membina jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah member bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan dilembaga ini.
6. Segenap staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis.
7. Segenap rekan-rekan civitas akademika Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Makassar, 14 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Teori dan Konsep.....	11
C. Kerangka Pikir	34
D. Fokus Penelitian.....	35
E. Deskripsi Fokus Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
B. Jenis dan Tipe Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Data.....	37
D. Informan Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Pengabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43

B. Hasil Penelitian	51
C. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	39
------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	34
Gambar 4.1 Lorong wisata.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah atau negara merupakan pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kehidupan warga negara, sejahtera atau melaratnya warga akan menentukan kualitas mereka yang berkuasa. Setiap negara memiliki visi kemanusiaan, setidaknya dalam rumusan konstitusi negara seperti istilah *welfare state*, kesejahteraan sosial, keadilan sosial, kemakmuran dan istilah serupa lainnya. Indonesia menganut prinsip bernegara sesuai dengan sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” serta sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Prinsip ini memberi tugas pada negara untuk menjalankan visi kemanusiaan dalam rangka membebaskan rakyat dari kemiskinan, ketertindasan, kemelaratan, ketidakadilan, keamanan, kenyamanan dan diskriminasi (Syarifuddin, J., 2015). Idealnya, negara dengan prinsip tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan memaksimalkan potensi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan atau program pemerintah pusat maupun daerah yang mendorong partisipasi masyarakat tersebut untuk aktif bersama-sama demi tercapainya cita-cita kolektif berkehidupan bernegara dan bermasyarakat yang sejahtera.

Perkembangan wilayah suatu pemerintahan, baik pusat maupun pemerintahan daerah dipengaruhi oleh banyak faktor. Baik itu faktor penghambat maupun faktor yang mendukung. Pergulatan antara kedua faktor tersebut kemudian pada akhirnya ditentukan oleh pengambilan keputusan pemerintah setempat. Salah satu faktor yang juga ikut memengaruhi perkembangan suatu wilayah yaitu

penduduk. Penduduk yang merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara atau wilayah, mengambil peran yang sangat sentral dalam proses perkembangan suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk yang tidak sesuai dengan porsinya apabila tidak ditangani dengan cara yang tepat, dapat membawa dampak yang kurang baik terhadap perkembangan suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk suatu wilayah secara alami terus mengalami peningkatan secara kuantitas. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor alami seperti kelahiran dan juga faktor sosial seperti proses perpindahan penduduk yang dari desa ke kota (urbanisasi) (Rudini, A, 2017). Kota merupakan pusat konsentrasi permukiman dan aktivitas penduduk. Sebagai tempat konsentrasi penduduk, kota berperan penting dan sangat dominan dalam kehidupan dan kehidupan warganya, dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial, politik dan tatanan budayanya, makin besar suatu kota, makin besar pula permasalahan perkotaan yang dihadapinya.

Pemerintah Kota Makassar bertanggungjawab untuk mengembangkan wilayahnya sesuai dengan konteks sosial budayanya. Pemerintah Kota Makassar mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan dan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian direvisi kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 yang selanjutnya diundang-undangkan dalam UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 menegaskan urusan wajib pemerintah daerah meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban

umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial menjadi tanggungjawab daerah yang harus mengurusinya. Kota Makassar merupakan kota metropolitan yang sebagian besar wilayahnya, terutama di pusat kota, tertutup oleh infrastruktur jalan dan bangunan lainnya yang berdampak terhadap kualitas lingkungan dan keseimbangan ekosistem serta kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya.

Data BPS Kota Makassar menunjukkan bahwa kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) eksisting kota Makassar hanya 9,2% dan setiap tahun terus mengalami penurunan. Kondisi ini masih jauh dari amanat UU No. 26 Tahun 2007, bahwa penyediaan dan pemanfaatan RTH dengan proporsi paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Makassar mulai melakukan program utama bagi Kota Makassar sendiri adalah ruang yang sempit, karena sebagian besar masyarakatnya bermukim didalam lorong, persoalan-persoalan perkotaan pun kebanyakan tumbuh dari lorong. Untuk mendukung Makassar Tidak Rantasa' adalah membuat program Lorong Wisata yang merupakan suatu Program yang dicanangkan oleh Walikota Makassar dalam menciptakan Kota Makassar yang bersih, terampil dan aman melalui Keputusan Walikota Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR) Kota Makassar. Wajah kota yang dahulu terkesan kotor, semrawut, dan kumuh diharapkan akan terlihat lebih cantik, rapi, karena bersih, hijau dan tertata dengan baik.

Salah satu cara meningkatkan kualitas pada kondisi keterbatasan ruang dan lingkungan di Kota Makassar yaitu dengan menghadirkan sebuah program inovasi yang memadukan antara fungsi ruang terbuka hijau (RTH) dalam urban agriculture (UA) pada masyarakat kota yaitu Lorong Wisata. Lorong wisata merupakan program pemerintah Kota Makassar dalam penataan lorong/gang pemukiman penduduk yang lebih nyaman (ekologi) dan produktif bagi masyarakat melalui kegiatan bertani dan diberi akronim lorong wisata. Keberadaan program ini dapat dijadikan sebagai bagian penting dari struktur pembentuk kota berkelanjutan (Wisneni. A, Abdullah, & Boceng. A., 2020).

Harapan dari Pemerintah Kota Makassar terhadap kegiatan longgar adalah untuk menjadikan Kota Makassar bersih tidak hanya di jalan-jalan umum tetapi juga di lorong-lorong jalan. Karena pada umumnya dikota-kota lainnya saat kita melihat jalan protokol itu sangat bersih tetapi ketika memasuki lorong di suatu daerah maka akan terlihat sampah yang berserakan.

Model pengelolaan lorong di Kota Makassar sebagai upaya perubahan lorong-lorong permukiman warga menjadi lorong permukiman yang tertata rapi, bersih dan hijau, dengan keberadaan warganya yang sadar untuk menjaga lingkungan tetap asri melalui pemanfaatan halaman. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan menanam bunga-bunga, pohon, sayur, tumbuhan apotik hidup. Model pengelolaan lorong berdasarkan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Makassar berupa Program Lorong Wisata yakni kerjasama antara warga dan pemerintah merupakan hal yang paling berperan dalam menyukseskan program Lorong Wisata sehingga membutuhkan kerja sama yang baik untuk mencapai

tujuan, serta memberikan nilai estetika sekaligus nilai ekonomis bagi kesejahteraan warga.

Dari observasi awal yang dilakukan peneliti, berbagai masalah muncul dalam pelaksanaan program lorong wisata. Seringkali peneliti menjumpai kurangnya atau belum maksimalnya partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan program longgar ini, sering kali peneliti melihat hanya ketua RT/RW yang bekerja sendiri dalam pengerjaan program lorong wisata ini. Partisipasi masyarakat dirasa kurang maksimal dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai hal yang menyebabkan tinggi atau rendahnya partisipasi dari masyarakat. Komunikasi antara RT dan masyarakat dirasa kurang terjalin dengan baik yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap program lorong wisata ini. Masih ada masyarakat yang kurang memahami proses untuk berpartisipasi dalam program ini. Ditemukan juga banyak tanaman-tanaman yang layu karena tidak terurus dan sampah yang masih berserakan di jalanan lorong.

Pengelolaan Program Lorong Wisata di Kota Makassar menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengelolaan Lorong Wisata masih perlu ditingkatkan dalam sosialisasinya, pelatihan, pengawasan, sesuai dengan indikator pencapaian tujuan, prospektif, dan reaktif. Selain itu masih terdapat beberapa hal yang menjadi kekurangan program antara lain tidak memiliki aturan Peraturan daerah ataupun Peraturan walikota, tidak memiliki batasan waktu yang berdampak terhadap pencapaian tujuan yang tidak jelas dan sulit untuk dievaluasi, serta pelaksanaan program yang tidak maksimal (Sartika, D, 2017).

Lorong wisata merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pada kondisi keterbatasan ruang dan lingkungan di kota Makassar melalui kerjasama antara warga dan pemerintah untuk mencapai tujuan dalam memberikan nilai estetika dan nilai ekonomis bagi kesejahteraan warga. Namun, pada pelaksanaan program lorong wisata, partisipasi masyarakat belum maksimal. Sehingga pengelolaan program Lorong wisata di Kota Makassar perlu ditingkatkan sesuai dengan indikator pencapaian tujuan, prospektif, dan reaktif serta program ini tidak memiliki aturan Peraturan daerah ataupun Peraturan walikota.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Lorong Wisata di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pemerintahan Kota Makassar pada program lorong wisata di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemerintahan Kota Makassar pada program lorong wisata di Kota Makassar.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi media penulis yang dapat memberikan dan menyalurkan sumbangan pemikiran kepada masyarakat terkait efektivitas pemerintahan Kota Makassar pada program lorong wisata di Kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian, sehingga penelitian dapat memperkaya teori yang di gunakan. Berdasarkan hasil penelusuran berbagai penelitian maupun literatur kepustakaan yang pernah dilakukan sebelumnya, peneliti tidak menemukan pembahasan yang memiliki objek kajian serupa dengan penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Adapun hasil penelusuran beberapa literatur kepustakaan yang dimaksud, antara lain:

Nama / Tahun	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
Ernaya, D (2016)	Transformasi Program Lorong Wisata (Longgar) Di Kota Makassar	Hasil penelitian menunjukkan, <i>Pertama</i> , Prospektif yaitu suatu perubahan yang memberikan dampak positif, pada program Lorong Wisata (Longgar) di Kota Makassar lorong mengalami perubahan seperti lebih bersih, indah, hijau dan sejuk. <i>Kedua</i> , Reaktif yaitu suatu dorongan bagaimana memberikan motivasi kepada masyarakat, mengadakan pelatihan, melakukan pengawasan, sosialisasi kepada masyarakat	Fokus penelitian, lokasi penelitian, tipe penelitian.

		mengenai program Lorong Wisata (Longgar) serta menjaga kesadaran masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.	
Rahmat (2016)	“Lorong Wisata” (Suatu Analisa Terhadap Kebijakan Walikota Makassar Di Kelurahan Pa’baeng-Baeng Kecamatan Tamalate)	Hasil peneltian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Walikota Makassar tentang Lorong Wisata di Kelurahan Pa’baeng-baeng Kecamatan Tamalate belum maksimal dan belum memenuhi harapan masyarakat, masih terdapatnya beberapa kendala dan kekurangan yang harus diperbaiki, seperti masih kurangnya sosialisasi pemerintah ke masyarakat, tidak adanya pemberdayaan, minimnya anggaran yang diberikan, kurang aktifnya instansi yang bertanggungjawab dalam hal ini berkaitan dengan implementor yang kurang personil, tidak konsisten, saling ketergantungan, akses lingkungan yang begitu sempit, tidak terlalu memadainya sarana dan prasarana, dan kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang, apatis/skeptis sehingga implementasi belum berjalan dengan baik dan merata. Selanjutnya mengenai Persepsi Masyarakat Kelurahan Pa’baeng-	Fokus penelitian, lokasi penelitian, dan metode penelitian, metode pengumpulan data

		<p>baeng Kecamatan Tamalate tentang Lorong Wisata sangat bervariasi, mulai dari pemahaman bahwa Lorong Wisata merupakan program ingin mengubah lorong menjadi bersih, hijau, indah, asri dan bernilai ekonomi serta masih banyak masyarakat yang kurang paham akan istilah lorong Wisata dikarenakan kurangnya sosialisasi, informasi dan perhatian pemerintah setempat.</p>	
Sartika, D (2017)	<p>Analisis Pengelolaan Lorong Wisata (Longgar) Dikota Makassar</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Program Lorong Wisata (LONGGAR) adalah penelitian ini menganalisis pelaksanaan pengelolaan lorong dikota makassar, faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan lorong dan model pengelolaan lorong yang diterapkan. Data penelitian diperoleh dari observasi langsung dilapangan serta wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengelolaan lorong wisata sebagai kelanjutan dari program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa.</p>	<p>Fokus penelitian, metode penelitian.</p>

<p>Hardiyanti, D.S Purnamasari, A.C (2019)</p>	<p>Efektifitas Aplikasi Smartcity Pada Pengguna Smartphone Untuk Mewujudkan Kota Nyaman Untuk Semua Di Kota Makassar</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi smartcity kota Makassar sangat efektif terhadap pengguna smart phone di kota Makassar, yakni penggunaan smart rt/rw yang dapat membantu kinerja RT/RW di Kota Makassar, aplikasi kucataki dapat membantu masyarakat Kota Makassar dalam mengisi formulir pembuatan akte kelahiran dan akte kematian sebelum mencetak di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, aplikasi layanan 112 salah satunya layanan homecare dengan pelayanan kesehatan dirumah warga, aplikasi Warroom meninjau Kota Makassar dalam satu layar. Efektifitas aplikasi smartcity pada pengguna smart phone Kota Makassar langsung dapat dirasakan oleh warga Kota Makassar.</p>	<p>Fokus penelitian, metode penelitian.</p>
--	--	--	---

Sumber: hasil kajian penulis, 2022.

Perbedaan secara umum penelitian saya dan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari segi fokus penelitian sehingga sangatlah berbeda apa yang menjadi penelitian yang dilakukan dari beberapa penelitian sebelumnya, dilihat dari segi fokus penelitian dan perilaku yang akan diteliti.

B. Kajian Teori dan Konsep

1. Konsep Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas secara etimologi berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Abdurahmat dalam Othenk (2008) yang menjelaskan pengertian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Susanto dalam Mardiah & Baiq Rhinelda, E. J. (2018) “Efektivitas merupakan efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Menurut Abdurrahmat dalam Budo, A. & Tampi, F. (2020) Efektivitas adalah manfaat sumber daya, sarana dan prasarana dalam

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Amin Tunggul Widjaya (Masyita, 2016) menjelaskan pengertian efektivitas adalah hasil keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.

Menurut Barnard dalam Waliulu, M. & Sampara Lukman, K. (2020) Efektivitas berkaitan dengan pencapaian ujuan. Efektivitas merupakan refleksi kemampuan untuk mempengaruhi suatu produk. Menurut Makmur (Waliulu, M. & Sampara Lukman, K., 2020) menguraikan bahwa jika dilihat dari segi kriteria efektivitas, unsur-unsur antara lain sebagai berikut :

1. Ketetapan penentuan waktu
2. Ketetapan perhitungan biaya
3. Ketetapan dalam pengukuran
4. Ketetapan dalam menentukan pilihan
5. Ketetapan berpikir
6. Ketetapan dalam melakukan perintah
7. Ketetapan dalam menentukan tujuan
8. Ketetapan-ketetapan sasaran.

Menurut Beni dalam Ali, A. K. (2019) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi

pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Steers menguraikan bahwa efektivitas input dalam organisasi tergambar dari antara lain, sejauh mana organisasi mampu merumuskan visi dan misi serta tujuan yang jelas sebagai dasar dalam menjalankan aktivitas organisasi. Visi dan misi yang jelas sebagai dasar bagi setiap anggota organisasi untuk bekerja melaksanakan tugas dan kegiatan yang ditetapkan. (Ansarullah, Abdul Kadir, L. O. M., 2019) .

Menurut Bangun (Nahriah, N, 2020) Efektivitas maksudnya melakukan suatu kegiatan sesuai dengan yang diharapkan dan terpenuhinya target yang ingin dicapai. Selanjutnya menurut Tamim dan Hermansyah efektivitas diklat dapat terlihat antara lain dari:

1. Terlaksananya seluruh program diklat sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
2. Rapinya penyelenggaraan seluruh kegiatan diklat berkat disiplin kerja, dedikasi dan kemampuan para penyelenggara.
3. Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia.
4. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan bagi program diklat.

Efektivitas sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar organisasi. Efektivitas secara umum menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Pasolong, Harbani (2017) mengatakan bahwa

“efektifitas berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. “Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab akibat dari variabel lain. Efektivitas ,merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk, atau manajemen organisasi. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input) maupun keluaran (output). Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Selanjutnya Martani & Lubis (1987) menyatakan bahwa : “Dalam setiap organisasi, efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Martani & Lubis (1987), menyatakan efektifitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektifitas

bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri

b. Indikator Pengukuran Efektivitas

Indriastuti, D. R. (2012) menjelaskan model-model yang di gunakan untuk menilai efektivitas organisasi yaitu :

a) *Functional Approach* (Pendekatan Fungsional)

Dalam model ini tujuan organisasi ditetapkan oleh kesesuaian logis berdasarkan hubungan antara bagian yang ada di dalam sistem soial. Pendekatan ini mempunyai manfaat yang lebih penting mengenai identifikasi *ultimate god* di dalam organisasi yang kompleks.

b) *Cost-Benefit Analysis* (Analisis manfaat)

Cost-Benefit Analysis menggunakan cara tradisional yang di aplikasikan untuk mengevaluasi efektivitas dari program pelatihan, perbedaan metode untuk mengembangkan produk dan sebagainya. Model ini digunakan untuk mengukur perbedaan efektivitas dari metode alternatif. Model *Cost-Benefit Analysis* memberikan smakin banyak stratefi yang lebih analitikal dan lengkap.

Martani & Lubis (1987), menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu :

1. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Dari ketiga pendekatan tersebut dapat dikemukakan bahwa efektivitas organisasi merupakan suatu konsep yang mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarnya.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan ini mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya (Miriam Budiardjo, 2008).

Kebijakan publik merupakan suatu prasarana bagi pemerintah untuk mengambil tindakan dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat maupun pemerintah. Dalam hal ini, masalah sosial yang ada disekitar masyarakat baik masalah pengangguran, kriminalitas, kemiskinan, kebersihan dan masih banyak lagi. Dengan adanya kebijakan publik, diharapkan dapat menjadi fasilitas yang sangat berperan dalam mengatasi berbagai masalah tersebut sekaligus dapat memberdayakan publik. Oleh

karena itu, suatu kebijakan publik harus didekati sangat hati-hati, baik pada tahap pembuatan dan implementasinya, serta pada tahap implementasinya agar senantiasa melibatkan masyarakat untuk diberdayakan supaya masyarakat mampu membangun sendiri potensi, kemampuan dan kekuatan mereka dengan pemberdayaan pemerintah kepada masyarakat sehingga apa yang diharapkan untuk keberhasilan sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Mewujudkan tujuan bangsa bukanlah hal yang mudah. Perlu usaha yang serius dan konsisten. Pencapaiannya pun harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia melalui kegiatan pembangunan serta perubahan.

Perubahan melalui pembangunan dan sebagainya dalam masyarakat Indonesia merupakan upaya seluruh masyarakat untuk melakukan perubahan secara terencana menuju masyarakat yang adil, makmur, aman, sejahtera, dan sentosa. Perwujudan makna pembangunan tersebut dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang diberi amanat untuk melaksanakannya. Upaya pemerintah untuk membangun masyarakat Indonesia salah satunya tertuang dalam bentuk kebijakan publik.

Kebijakan publik adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wawancara yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah”. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan yang lebih

bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan public. Oleh karena itu , kita memerlukan atau konsep kebijakan public yang lebih tepat (Budi. Winamo, MA, 2007).

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warganegaranya (AG. Subarsono, 2010).

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variable atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain Dalam Pandangan Edwards III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat Variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. (1) Secara umum, banyak ilmuan sepakat bahwa komunikasi itu merupakan sebuah proses penyampaian pesan dalam bentuk ide, gagasan, pikiran, perasaan, emosi, perilaku dan sebagainya. Dalam proses komunikasi, paling sedikit terdapat tiga unsur pokok, yaitu penyebar pesan, pesan dan penerima pesan. Suatu komunikasi dapat dikatakan efektif/berhasil bila diantara penyebar dan penerima pesan terdapat suatu pengertian yang sama mengenai ini pesan. (2) Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan

secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. (3) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. (4) Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedure* atau *SOP*). (AG. Subarsono, 2010).

Implementasi kebijakan itu merupakan suatu aktivitas yang paling penting. Realita menunjukkan, Implementasi kebijakan itu sejak awal melibatkan sebuah proses rasional dan emosional yang teramat kompleks. Menurut Sabatier dalam Kadji bahwa makna implementasi adalah upaya untuk dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Erwin Z. G. & Yosef. P. K, 2016).

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn adalah untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna (*perfect*

implementation) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi Eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan pada teori sebabakibat atau hubungan kausalitas yang andal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan Kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas terperinci dan Ditempatkan dalam uraian yang tepat.
- i. Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna antara berbagai elemen yang terlibat dalam program.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Solichin A.W., 2005).

3. Konsep Pemanfaatan Ruang

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak. Adapun penataan ruang pada hakikatnya adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Secara lebih spesifik, penataan ruang dapat diartikan

sebagai suatu upaya untuk mewujudkan tata ruang yang terencana, dengan memperhatikan keadaan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, interaksi antar lingkungan, tahapan dan pengelolaan pembangunan, serta pembinaan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia yang ada dan tersedia, dengan selalu mendasarkan pada kesatuan wilayah nasional dan ditujukan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat (Sidik. A, 2005).

Prinsip penataan ruang adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, efektif dan efisien, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Adapun penataan ruang bertujuan untuk terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Amanat UUD 1945 seperti yang diuraikan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan tanah oleh negara mempunyai arti bahwa negara mempunyai wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharannya. Atas dasar hak menguasai ini, negara dapat menentukan bermacam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang perorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta

badan-badan hukum.

Pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penataan Ruang dijelaskan bahwa pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Ketentuan umum tentang Pemanfaatan Ruang ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Penataan Ruang sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- b. Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.
- c. Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah.
- d. Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- e. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya.

- f. Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.

4. Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah terdiri dari jurusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Peranan pemerintah daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting, ini karena pemerintah daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat.

Pemerintah berasal dari kata Perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah

adalah orang, badan atau aparat yang memberi Perintah. Pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara kedalam dan keluar. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara (Harnida, 2012)

Finer dalam Harnida (2012) Pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (*procces*), wilayah Negara tempat kegiatan (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), cara, metode, dan sistem (*manner, method and sistem*) dari Pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Soares, Armando dkk. (2016) Pemerintah Daerah berperan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan pemerintah daerah melakukan perencanaan, pelaksanaan pembangunan secara fisik maupun non fisik oleh pemerintah daerah sendiri tetapi masih menghadapi kendala dan permasalahan yaitu:

- a. Program perencanaan yang di rumuskan oleh komonitas masyarakat dan pemimpin lokal dalam bentuk dokumen rencana yang diajukan kepada pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri kadang ditolak (dipending). Karena mereka selalu berpatokan kepada APBN.
- b. Pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri melakukan menyeleksi dokumen rencana yang diajukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah untuk memilih program-program tertentu saja untuk mengesahkan ini adalah menjadi salah satu masalah bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
- c. Kementerian dalam negeri pusat mengusulkan proposal untuk anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) tidak berdasarkan pada kondisi dan situasi riil yang ada di daerah, sehingga pencairan dana APBN tidak mencukupi pada proposal proyek yang di sampaikan oleh pemerintah daerah.
- d. Faktor penghambat secara umum dalam perencanaan pembangunan akibatnya kebanyakan kegiatan pembangunan yang di lakukan tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat di daerah sehingga pemanfaatan dari hasil pembangunan oleh masyarakat menjadi tidak maksimal. Bahkan

banyak pula masyarakat yang kecewa karna apa yang di bangun oleh pemerintah ternyata tidak berkaitan sama sekali dengan apa yang di inginkan oleh masyarakat.

Peranan pemerintah daerah berarti kedudukan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Selanjutnya peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya, pemerintah daerah memiliki beberapa asas. Asas pemerintah daerah secara spesifik diatur dalam undangundang. Ada empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah sebagai berikut:

- 1) Asas Sentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kemenangan berada di pemerintah pusat.
- 2) Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kemenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.
- 3) Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kemenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.
- 4) Asas Tugas Pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah

daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya. Contohnya adalah penugasan dari gubernur kepada bupati atau walikota atau dari bupati atau walikota kepada perangkat camat atau desa.

5. Penataan Lorong Melalui Lorong Wisata di Kelurahan

Penataan lorong dalam pelaksanaan penataan ruang, diarahkan kepada pemanfaatan lorong yang efektif dan efisien dan diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan penataan lorong wisata.

Adapun *land use planning* menurut Pasal 6, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rt-Rw Kota Makassar Tahun 2005-2015 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan penataan ruang kota adalah:
 - 1) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, berbudidaya dan berkeadilan.
 - 2) Terselenggaranya pemanfaatan ruang dan wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya saing lingkungan hidup, kemampuan masyarakat dan pemerintah serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
 - 3) Terwujudnya keterpaduan dan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sebesar-besarnya sumber daya manusia.

4) Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.

b. Kebijakan pengembangan penataan ruang kota pasal 6 adalah :

- 1) Memanfaatkan fungsi kota sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa berskala nasional dan internasional.
- 2) Memprioritaskan arah pengembangan kota kearah koridor timur, selatan, utara dan membatasi pengembangan kearah barat agar tercapai pengembangan ekosistem.
- 3) Melestarikan fungsi dan keserasian lingkungan hidup didalam penataan ruang dalam mengoptimalisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- 4) Mengembangkan sistem prasarana dan sarana kota yang berintegrasi dengan sistem regional nasional dan internasional.

Wali kota Makassar kemudian menjabarkan visi-misi pembangunan kota selaras dengan Perda Nomor 6 tersebut, yaitu dalam program MTR (Makassar Tidak Rantasa) yang berorientasi pada lingkungan kota Makassar yang bersih, apik, tertata, jauh dari tingkat kriminal dan kehidupan masyarakat sejahtera, diwacanakan dalam program lorong wisata.

Pemerintah kota Makassar Mengharapkan, melalui program Gerakan Makassar Tidak Rantasa, menginginkan program lorong wisata merupakan program wujud nyata, komitmen, dan tingginya kepedulian pemerintah kota Makassar dalam menjadikan Makassar sebagai kota dunia. Program lorong wisata ini diharapkan bisa menjadi inspirasi dan pelecut semangat segenap

warga kota Makassar dalam mewujudkan Makassar dua kali lebih baik.

Konsep lorong wisata merupakan salah-satu bagian integral dari program Pemerintah Walikota Makassar. Program ini dapat memanfaatkan lorong yang ada di Kota Makassar menjadi lebih produktif, inovatif dan ramah lingkungan. Inovasi ini diapresiasi dan dinilai dapat membuat kesadaran masyarakat lorong untuk menciptakan kebersihan lingkungannya dan hal-hal positif lain dari penerapan konsep lorong wisata ini. Sehingga untuk lebih di tingkatkan diperlukan adanya kontribusi modal sosial sebagai suatu dimensi pembangunan yang meningkatkan kesadaran masyarakat untuk saling bekerjasama menjaga pengelolaan lorong yang ramah lingkungan.

Dengan program Lorong Wisata dikembangkan dengan melakukan pembenahan lorong dan memanfaatkan lahan yang ada dilorong seperti penanaman cabe, tomat dan sayur-sayuran. Diharapkan ini akan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang tinggal dilorong.

Mengubah wajah lorong menjadi hijau, bersih, menimalisir penyakit sosial yang ada dilorong-lorong tersebut serta saling bekerjasama menjaga pengelolaan lorong yang ramah lingkungan. Karena dengan adanya kegiatan keseharian yang positif yang berpenghasilan serta memperbaiki psikologi masyarakat melalui pandangan yang hijau, asri, aman dan tentram serta bisa menjadi kota percontohan di Indonesia.

Penataan lorong harus memperhatikan target sasaran pengelolaan lingkungan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni :

1. Tercapainya keselarasan, keserasian antara manusia dengan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya manusia Indonesia insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
3. Terjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
6. Terlindunginya Negara kesatuan republik Indonesia terhadap dampak usaha atau kegiatan yang diluar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Atas dasar ketentuan tersebut maka didalam penataan Lorong Wisata harus melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini, Pemerintah Kota, Pemerintah Kelurahan serta masyarakat daerah tersebut agar kiranya dapat bekerja sama dalam mewujudkan suatu yang dimaksudkan oleh Walikota Makassar.

Tujuan penataan Lorong Wisata adalah untuk mengembangkan individu, keluarga, kelompok ataupun komunitas dari keadaan atau tidak kurang berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Tujuan utama penataan Lorong Wisata adalah meningkatkan kondisi atau taraf hidup masyarakat terutama pada lingkungan komunitas yang bersangkutan. Penataan lorong dalam pelaksanaan penataan ruang, diarahkan kepada pemanfaatan lorong yang efektif dan efisien dan diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan penataan Lorong Wisata. Bertolak dari sisi pemerintahan di kota Makassar lorong wisata telah dipersiapkan sebagai destinasi para tamu dari berbagai negara, pemandangan yang sangat asri, ditata apik dengan berbagai tanaman dan dipersiapkan makassar sebagai kota percontohan nasional.

Gambaran umum kegiatan yang dilakukan dalam rangka menelaah kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam penataan Lorong Wisata yang dituangkan dalam penelitian karya ilmiah dengan judul kerjasama masyarakat dengan pemerintah kelurahan dalam penataan lorong wisata di kelurahan Buakan Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai berikut:

a. Tahap perencanaan

- 1) Menelaah peraturan perda tentang penataan lorong garden.
- 2) Menelaah program pemerintah kota Makassar dalam mewujudkan Makassar Tidak Rantasa.
- 3) Menelaah Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 4) Menelaah bentuk-bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat.
- 5) Membuat pedoman observasi untuk melihat hasil kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah.
- 6) Menyiapkan sarana pendukung.

b. Tahap pelaksanaan penelitian

- 1) Memulai penelitian dengan skenario yang telah ditentukan.
- 2) Melakukan wawancara kepada pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, ketua PKK, dan ketua LPM,
- 3) Membagikan angket penelitian kepada warga.

c. Tahap pengamatan

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan kepada masyarakat dan pemerintah tentang partisipasinya dalam rangka penataan lorong wisata di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini kota Makassar.

C. Kerangka Pikir

Efektivitas merupakan ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas juga bermakna taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan.

Lorong wisata adalah salah satu program Walikota Makassar. Pemerintah Kota Makassar mengharapkan, melalui program Lorong Wisata merupakan program wujud nyata, komitmen, dan tingginya kepedulian diharapkan bisa menjadi inspirasi dan pelecut semangat segenap warga kota Makassar dalam mewujudkan Makassar dua kali lebih baik dan menjadi kota percontohan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori Martani & Lubis (1987) untuk mengukur tingkat efektivitas pemerintahan Kota Makassar pada program Lorong Wisata di Kota Makassar berdasarkan pada indikator pengukuran efektivitas Martani & Lubis (1987), yaitu: (1) input, (2) proses, dan (3) output.

Secara konseptual bagan kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:




Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah efektivitas program Lorong Wisata di Kota Makassar berdasarkan konsep indikator pengukuran efektivitas yaitu : (1) Input, (2) Proses, dan (3) Output.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

- 1) Input, yaitu untuk melihat sejauh mana keberhasilan program lorong wisata yang digagas oleh pemerintah Kota Makassar dalam menghasilkan sumber daya baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui
- 2) Proses, yaitu untuk mengukur apakah pelaksanaan program lorong wisata yang digagas oleh dapat diterapkan atau terlaksana dengan baik di Kota Makassar.
- 3) Output, yaitu untuk mengukur tingkat keberhasilan atau hasil yang dapat dicapai pemerintah Kota Makassar dan bermanfaat bagi masyarakat melalui program lorong wisata.



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, dalam penelitian ini berlokasi di Lorong Wisata Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan setelah seminar proposal dilaksanakan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif, proses dan makna lebih dominan dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program lorong wisata di Kota Makassar. Selain

itu teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang antar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran dan narasi secara jelas mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan apa yang dilakukan atau dialami peneliti. Masalah yang akan diteliti terkait dengan efektivitas program lorong wisata di Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber data

Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta yang memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu sumber keadaan. Sumber data terbagi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan yang mengetahui dan berkenaan dengan pelaksanaan penelitian ini terkait efektivitas program lorong wisata di Kota Makassar.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi, catatan-cacatan, serta dokumentasi lain yang berfungsi sebagai data penunjang dan pelengkap informasi yang dibutuhkan terkait efektivitas program lorong wisata di Kota Makassar.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalkan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2014).

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Sumber informan merupakan informasi dari pemerintah dan elemen-elemen yang terkait dengan program pemerintah kota yaitu program lorong wisata di Kota Makassar. Berikut ini informan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jabatan
1	Bahrul Alamsyah, A.Md	Lurah Buakana Kecamatan Rappocini
2	Awaluddin	Ketua RW 07 Kelurahan Buakana
3	Nurnaningsih	Ketua RT 01 Kelurahan Buakana
4	Rosmawati	Masyarakat
5	H. Taufik	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek

penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Dalam hal ini, observasi dilakukan peneliti di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini sebagai awal mula peneliti melihat suatu fenomena kebijakan pemerintah tentang Lorong Wisata yang begitu jauh dari pengimplementasian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data atau keterangan-keterangan dengan cara tanya jawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan itu, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan alat wawancara berupa pedoman wawancara, buku catatan, tape recorder dan kamera handphone. Hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Dalam metode ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada beberapa perwakilan dari pihak pemerintah serta perwakilan dari masyarakat lorong itu sendiri untuk bagaimana dapat menganalisis implementasi kebijakan Walikota Makassar dan persepsi masyarakat itu sendiri

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dalam hal ini, peneliti memakai tehnik pengumpulan data dokumenasi karena tidak lepas dari apa yang peneliti gunakan dimana peneliti mengambil referensi tidak jauh dari dokumen-dokumen yang ada dikelurahan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan. Adapun langkah-langkah dengan prosedur tahapan-tahapan berikut (Sugiyono, 2017):

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan langkah yang dilakukan dengan memilih data dan fokus kepada data yang memang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan data yang sifatnya sebagai pelengkap saja.

2. Penyajian data

Dari data yang diperoleh dari lapangan kemudian antara mana yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan kemudian melakukan pengelompokan dan diberikan batasan masalah.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data maka dilakukan kesimpulan awal. Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah penelitian. Pada proses

pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan makna terhadap data yang sudah dikumpulkan.

G. Pengabsahan Data

Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi menurut Sugiyono (2012) antara lain:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti dapat membandingkan hasil pengamatan, wawancara dengan dokumen-dokumen yang ada ataupun membandingkan hasil wawancara dari responden (data primer) dengan buku bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Untuk mendapatkan informasi yang valid peneliti bisa melakukan pengamatan beberapa kali.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Makassar

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki luas areal 175,77 km² dengan penduduk 1.223,540 sampai 1.449.401 jiwa. Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industry, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan, barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Ujung Pandang dengan Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada perkembangannya, nama Ujung Pandang di kembalikan lagi menjadi Kota Makassar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar. Pada tahun 2020 Kota Makassar telah berusia 413 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan eduentertainment, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara.

2. Letak Geografis

Secara astronomis, Kota Makassar terletak antara $119^{\circ}24'17'38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}8'6'19''$ Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Makassar memiliki batas-batas:

- a. Utara : Kabupaten Maros;
- b. Selatan : Kabupaten Gowa;
- c. Barat : Selat Makassar;
- d. Timur : Kabupaten Maros.

Kondisi topografi Kota Makassar bervariasi yaitu ketinggian Kota Makassar antara 0-25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20°C sampai dengan 32°C . Kondisi iklim terbagi dua musim (musim hujan dan musim kemarau) namun waktu kemarau relatif lebih panjang dibanding musim hujan kemudian rata-rata kelembapan udara sekitar 79%, temperature udara sekitar $25,10 - 29,0^{\circ}\text{C}$ dan rata-rata kecepatan angin 4,2 knot.

Secara Administratif, Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan, yaitu: Kecamatan Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, ujung Tanah, Tallo, Panakukkang, Manggala, Biringkanaya dan Tamalanrea. Pada tahun 2015, Jumlah Kelurahan di Kota Makassar tercatat memiliki 143 kelurahan, 996 RW dan 4968 RT.

Kota Makassar merupakan dataran rendah dengan ketinggian yang bervariasi antara 0-25 meter di atas permukaan laut. Pada akhir tahun 2015, luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Mariso (1,82 km²), Mamajang (2,25 km²), Tamalate (20,21 km²), Rappocini (9,23 km²), Makassar (2,52 km²), Ujung Pandang (2,63 km²), Wajo (1,99 km²), Bontoala (2,10 km²), Ujung

Tanah (5,94 km²), Tallo (5,83 km²), Panakkukang (17,05 km²), Manggala (24,14 km²), Biringkanaya (48,22 km²), serta Tamalanrea (31,84 km²).

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar

No	Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase 95)
1	Mariso	1,82	1,04
2	Mamajang	2,25	1,28
3	Tamalate	20,21	11,50
4	Rappocini	9,23	5,25
5	Makassar	2,52	1,43
6	Ujung Pandang	2,63	1,50
7	Wajo	1,99	1,13
8	Bontoala	2,10	1,19
9	Ujung Tanah	5,94	3,38
10	Tallo	5,83	3,32
11	Panakkukang	17,05	9,70
12	Manggala	24,14	13,73
13	Biringkanaya	48,22	27,43
14	Tamalanrea	31,84	18,11
Kota Makassar		175,77	100,0

Sumber: Kelurahan Buakana, 2023.

Dari 14 wilayah Kecamatan yang ada dalam wilayah Kota Makassar, Kecamatan Rappocini merupakan wilayah dimana lokasi penelitian berada tepatnya di Kelurahan Buakana.

3. Visi dan Misi Kota Makassar

Makassar “Dua Kali Tambah Baik” adalah sebuah tekad perubahan progresif yang terukur sekaligus menjadi target pencapaian dalam 5 tahun di segala bidang di seluruh kota Makassar yang dapat di rasakan langsung oleh

seluruh masyarakat untuk mewujudkan target dua kali tambah baik di butuhkan pelayanan publik standar kota dunia yang bekerja dalam sebuah teknologi terpadu yaitu sumber dan smart city sekaligus menjawab adaptasi terhadap revolusi industri 4.0 .

Pemerintah Kota Makassar (Walikota dan Wakil Walikota Makassar) dalam tahun 2021-2026 menetapkan Visi berikut: “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan *Smart City* Dengan Imunitas Kuat Untuk Semua”,

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Makassar menetapkan 3 misi, yaitu:

- a. Revolusi SDM dan percepatan reformasi Birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia, bersih dari indikasi korupsi.
- b. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas, ekonomi, dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.
- c. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “Sombere dan *Smart City*” untuk semua.

4. Gambaran Umum Kecamatan Rappocini

a. Letak Geografis

Kecamatan Rappocini merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar dengan luas 9,05 km² . Dengan batas-batas kawasan sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Panakkukang
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Manggala
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tamalate
- 4) Barat : Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Makassar

Kecamatan Rappocini terdiri dari 10 kelurahan. Dari luas wilayah tersebut tercatat bahwa Kelurahan Gunung Sari memiliki wilayah terluas yaitu 2,31 km² sedangkan wilayah terkecil adalah Kelurahan Bontomakkio dengan luas wilayah 0,20 km², Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.2 Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Rappocini

No	Kelurahan	Luas (km ²)
1	Gunung Sari	2,13
2	Karunrung	1,52
3	Mappala	0,50
4	Kassi-Kassi	0,82
5	Bonto Makkio	0,20
6	Tidung	0,89
7	Banta-Bantaeng	1,27
8	Buakana	0,77
9	Rappocini	0,36
10	Ballaparang	0,59
Kecamatan Rappocini		9,05

Sumber: Kelurahan Buakana, 2023.

b. Topografi

Kecamatan Rappocini merupakan daerah dataran tinggi yang terletak di daerah bukan pantai dengan topografi < 500 meter dari permukaan laut (mdpl).

c. Hidrologi dan Sumber Daya Air

Keadaan hidrologi di Kecamatan Rappocini sebagian besar masyarakatnya menggunakan jasa PDAM untuk kebutuhan air bersih penduduk. Selain itu sebagian penduduk juga masih mengkonsumsi air tanah yang berasal dari sumur gali dan sumur bor. Adapun ketersediaan air bersih ini sebagian besar dapat memenuhi kebutuhan hidup penduduk setempat.

d. Jenis Tanah

Berdasarkan data yang kami dapat, jenis tanah yang terdapat di yaitu jenis tanah Inceptisol, Tanah Inceptisol adalah tanah yang mudah yang tingkat perkembangannya lemah yang dicirikan oleh horizon, penciri kamblik, tanah ini terbentuk dari beberapa macam bahan induk yaitu aluvium, batu pasir, batu liad, dan batu amping.

e. Klimatologi

Berdasarkan catatan stasion klimatologi, Kecamatan Rappocini beriklim subtropis, dengan suhu maksimum 33,5°C dan suhu minimum 23,4°C. Dan memiliki dua musim yaitu : musim kemarau pada bulan Maret sampai dengan bulan September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Februari.

f. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan akumulasi dari berbagai jenis lahan yang berstruktur pada suatu lahan yang di fungsikan untuk pengembangan atau pembangunan lahan agar terwujud efisiensi hubungan antara fungsi atau antara bagian di dalam kawasan. Penggunaan atau pemanfaatan lahan di Kecamatan Rappocini, mengingat sebagian besar wilayah kecamatan ini telah dipergunakan untuk aktifitas perkotaan seperti fasilitas perkantoran, pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan permukiman serta open space.

5. Profil Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini

Kelurahan Buakana adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Buakana memiliki kode wilayah 73.71.03.1004. Memiliki luas sekitar + 0,77 km² dan Titik kordinat: 5°09'30.1"S 119°25'54.1"E. Batas-batas Kelurahan Buakana yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Balla Parang.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Banta-Bantaeng.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Masale.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Rappocini.

Kelurahan Buakanan terdiri dari 40 RT dan 7 RW dengan jumlah penduduk Kelurahan Buakana tercatat 12.645 jiwa yang terdiri atas 6.301 jiwa laki-laki dan 6.344 jiwa perempuan.

Buakana terdiri atas dua kata yaitu Bua dan Kana. Bua artinya hasil dan Kana artinya kata. Jadi Buakana artinya hasil pembicaraan. Kelurahan Buakana diambil dari nama seorang Raja keturunan Raja Gowa yang bernama Karaengta' Buakana. Beliaulah yang pertama kali menemukan sebuah kampung yang belum mempunyai nama sehingga warga yang menetap di kampung tersebut sepakat memberikan nama pada wilayah tersebut dengan nama "Buakana". Dikelurahan Buakana terdapat 2 (dua) nama Kampung yaitu:

- a. Kampung Rappocini yaitu nama yang terdiri atas dua kata yakni "Rappo dan Cini". Rappo artinya sejenis buah dan Cini artinya lihat.
- b. Kampung Bontocinde. Bontocinde terdiri dari dua kata yaitu Bonto dan Cinde. Bonto artinya daratan dan Cinde artinya cahaya.

B. Hasil Penelitian

Pengelolaan lorong di Kota Makassar mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dalam upaya mewujudkan keberhasilan program Pemerintah Kota Makassar yaitu Lorong Wisata sebagai salah satu program dalam Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa yang merupakan lanjutan dari program lorong gareden.

Program Lorong Wisata atau Longwis di Makassar, Sulawesi Selatan, bukan sekadar mempercantik lorong agar bersih dan indah. Lebih dari itu, lorong atau gang sempit ini menjadi rumah, ruang bermain, hingga ruang tamu bagi warganya. Lorong juga adalah tempat memulai pemulihan pascapandemi.

Program lorong wisata sangat identik dengan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Pada periode pertamanya, ia telah memprogramkan lorong

wisata. Kala itu, masyarakat diminta memaksimalkan lorong untuk menanam bahan pangan, khususnya cabai. Kini, konsep lorong wisata diubah menjadi lebih luas dengan nama lorong wisata. Sesuai visi misi Adama, ada 5 ribu lorong wisata yang akan dibuat. Dibagi 1000 lorong tiap tahun, setiap lorong punya potensi yang berbeda. Lorong wisata adalah bagian dari lorong wisata, ini salah satu misi mengembangkan dari apa yang sudah ada sebelumnya.

Program lorong wisata yang digagas Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto tidak hanya sekedar untuk menghadirkan destinasi wisata baru, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas. Bahkan melalui program Lorong Wisata, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berjanji akan menuntaskan persoalan anak putus sekolah. Khususnya yang tinggal di lorong. Jadi Lorong Wisata adalah pintu seluruh program strategis pemerintah kota.

Hadirnya program lorong wisata diapresiasi dan diharapkan efektif dan membuat kesadaran masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Untuk mengetahui efektivitas program Lorong Wisata di Kota Makassar khususnya di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini, peneliti menggunakan teori Martani & Lubis (1987) yang terdiri dari 3 indikator yaitu input, proses, dan output. Indikator tersebut penting dalam menelusuri keefektifan suatu kebijakan atau program ditujukan kepada publik.

1. Input

Indikator ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam hal ini melihat sejauh mana keberhasilan

pemerintah Kota Makassar dalam menghasilkan sumber daya baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Lorong Wisata.

Kota Makassar sebagai Ibu Kota Sulawesi Selatan pun tak luput dari berbagai masalah, mulai dari kemiskinan karena kurangnya keterampilan, kebersihan karena kurangnya kesadaran, kriminalitas karena banyaknya pergaulan bebas serta masih banyak lagi masalah lain yang mengerogoti masyarakat kota. Oleh karena itu, melalui berbagai masalah yang timbul, maka pemerintah Kota Makassar menciptakan berbagai kebijakan-kebijakan atau program-program. Program lorong wisata bermakna untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan, keamanan dan keterampilan melalui kerja sama pemerintah melalui fasilitas yang diberikan. Di lorong wisata masyarakat menanam cabai, bawang, bahkan padi hingga sayur-sayuran. Selain itu, Danny juga telah mewajibkan semua lorong memelihara lobster air tawar.

Sebagai bentuk keseriusan dari Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung program “Makassar Tidak Rantasa” adalah membuat program Lorong Wisata yang merupakan suatu program yang dicanangkan oleh Walikota Makassar dalam menciptakan Kota Makassar yang bersih, terampil dan aman melalui Keputusan Walikota Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta’ Tidak Rantasa (Gemar MTR) Kota Makassar.

Lorong wisata adalah program unggulan Pemerintah Kota Makassar, sebagai upaya pemulihan ekonomi berbasis masyarakat. Lorong wisata memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak hanya sekadar destinasi wisata baru. Program Lorong Wisata merupakan salah satu upaya Pemkot Makassar untuk memulihkan kembali perekonomian di wilayahnya.

Didalam menjaga kenyamanan dalam menunjang Program Lorong Wisata, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar membantu perbaikan infrastruktur yang menjadi kebutuhan warga berupa pemeliharaan jalan dan pemeliharaan/rehabilitasi drainase khususnya sarana pengendali banjir yang selama ini menjadi salah satu permasalahan bagi warga kota Makassar yang hamper setiap tahunnya mengalami banjir/genangan tinggi di saat musim penghujan atau dengan hujan yang berintensitas tinggi. Pada tahun ini Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum dengan sumber dana APBD Tahun 2023 Kota Makassar akan membuat Detail Engineering Design (DED) Drainase yang tersebar di Kota Makassar. Berdasarkan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar perlu mendapat bantuan teknis dalam bidang perencanaan yang akan diwujudkan dengan adanya pengadaan Konsultan Perencanaan.

Tujuan dari lorong wisata ini adalah sebenarnya untuk menyadarkan masyarakat pentingnya akan lingkungan sehat, terampil, rapih, bersih dan yang paling penting memperbaiki psikologis masyarakat akan dampak pergaulan yang semakin tidak terarah dengan keterampilan yang memiliki

nilai ekonomis ini. Dalam hal ini dikemukakan Lurah Buakana terkait tujuan program lorong wisata:

“Lahirnya lorong wisata merupakan kebijakan Walikota Makassar sesuai visinya menciptakan kota dunia melalui tata lorong. Tujuan daripada lorong wisata ini ialah program ini untuk setiap kelurahan ada, tujuannya untuk menciptakan lorong produktif dalam hal kenamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan” (Wawancara dengan BA tanggal 24 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa program ini dimaksudkan untuk menciptakan lorong produktif dan memperbaiki kondisi lorong-lorong di Kelurahan Buakana. Lorong yang biasanya kumuh dan sering menjadi sumber penyakit sosial, ingin diubah menjadi lorong yang asri, sejuk, indah, bahkan ditargetkan menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat.

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika warga mendengar program ini, mereka sangat antusias ingin melaksanakan bagian daripada program Walikota Makassar untuk mewujudkan lorong-lorong yang bersih, asri dan nyaman melalui program lorong wisata, sisa bagaimana pemerintah mensosialisasikan dan menginformasikan secara merata tentang program ini agar implementasi kebijakan Walikota Makassar tentang lorong wisata dapat berjalan dengan baik.

Peningkatan arus urbanisasi merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari, bahkan setiap tahun terus mengalami peningkatan. Fenomena ini semakin menambah keragaman kota Makassar dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya, namun disisi lain juga tidak menutup kemungkinan

semakin bertambahnya masalah disegala bidang dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, masalah yang kerap kali paling nampak ialah masalah kemiskinan, kebersihan, keamanan yang dimana begal merajalela dan masih banyak masalah lainnya yang senantiasa membayang-bayangi masyarakat Kota Makassar. Nah, dari masalah yang senantiasa mengintai masyarakat Kota Makassar, memaksa pemerintah kota untuk senantiasa mengeluarkan ide-ide cemerlang dalam hal menyelesaikan segala permasalahan yang ada di Kota Makassar melalui kebijakan, keputusan yang diambil. Dalam hal ini, Pembuat kebijakan publik adalah para pejabat-pejabat publik, termasuk para pegawai senior pemerintah yang tugasnya tidak lain adalah untuk memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan publik/kemaslahatan umum. Pemerintah harus membuat kebijakan/program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan cocok dengan kondisi masyarakat saat ini. Seperti yang diungkapkan salah satu Ketua RW di Kelurahan Buakana terkait program lorong wisata dengan kebutuhan masyarakat:

“Lorong Wisata sangat cocok dengan kondisi lorong-lorong saat ini atau yang marak terjadi dikalangan masyarakat khususnya lorong-lorong. Jadi dengan adanya program ini akan mensejahterakan masyarakat melalui tata kelola lorong kota, karena lebih banyak masalah yang timbul dipemukiman lorong. Diharapkan dengan adanya program lorong wisata dapat menjadi sebuah alternatif untuk meminimalisir penyakit sosial yang ada, meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, dan masyarakat disini khususnya di lorong saya masyarakat sangat aktif berpartisipasi dengan program ini.” (Wawancara dengan AW tanggal 24 Mei 2023).

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu warga di Kelurahan Buakana:

“Ya kebijakan pemkot ini sangat cocok dengan kondisi lorong-lorong di Kota Makassar saat ini. Apalagi lorong itu kan identik dengan lingkungan kurang sehat, kotor, sering terjadi tawuran remaja karena di lorong itu terkenal dengan banyak brandalan atau anak nakal yang biasanya itu anak yang minim pendidikan atau putus sekolah yang mengakibatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat terganggu atau tidak terpenuhi. Dengan adanya program ini diharapkan mampu memperbaiki kondisi sehingga masyarakat kita di lorong ini khususnya dapat menjalani kehidupan yang sehat, lingkungan bersih, nyaman dan terjamin keamanannya.” (Wawancara dengan RS tanggal 24 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa program lorong wisata merupakan kebijakan yang tepat saat untuk menata lorong-lorong yang ada di Kota Makassar guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat. Tentu persoalan ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah, melainkan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Fenomena yang sering menjadi masalah dalam lingkungan perkotaan salah satunya adalah masalah kebersihan, kemiskinan, keamanan dalam hal ini kenakalan remaja, begal dan sebagainya . Dengan demikian , faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya masalah sosial yang ada adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, faktor psikologis dan penting harus kita ketahui bahwasanya kebanyakan permasalahan tersebut berasal dari lingkungan yang tidak sehat dalam hal ini lorong-lorong di perkotaan.

Demikian pula dengan masyarakat lorong di sebagian Kelurahan Buakana, walaupun secara rata-rata pekerjaan atau kesibukan masyarakat kebanyakan pada bidang perdagangan dan jasa, namun tidak lepas dari kondisi dan perilaku sosial masyarakat yang masih bisa dikatakan lemah

disektor pendidikan yang dimana mempengaruhi kondisi masyarakat sekitar menjadi pengangguran, penjudi, peminum, dan pemulung. Sehingga dari perilaku masyarakat seperti itu secara otomatis mempengaruhi sikap masyarakat menjadi apatis terhadap kebijakan atau program pemerintah yang ada, mulai dari ketidakpedulian mereka terhadap lingkungan sehingga membuat lingkungan dalam hal ini lorong menjadi gelap, kumuh, kotor, coretan dimana-mana dan berandalan yang sering nongkrong diujung lorong.

Sebagaimana dikemukakan oleh Lurah Buakana Kecamatan Rappocini:

“Program ini sangat bagus dan sangat efektif serta sesuai kebutuhan masyarakat lorong, hanya saja tingkat pendidikan yang mempengaruhi perilaku pemahaman masyarakat untuk ikut andil dalam program itu, namun melalui pendekatan dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya program ini.” (Wawancara dengan BA tanggal 24 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa program lorong wisata dinilai bagus dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lorong-lorong yang ada di Kota Makassar, namun kurangnya pendidikan sebagian masyarakat diberbagai lorong mempengaruhi keikutsertaan mereka dalam mensukseskan program, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat.

Dalam hal ini, keefektifan sebuah kebijakan, keputusan maupun program pemerintah itu perlu adanya dukungan publik itu sendiri, disamping pemerintah perlu cermat menempatkan sesuatu pada tempatnya, artinya pemerintah atau instansi yang terkait dalam program ini perlu melakukan pendekatan terlebih dahulu mempengaruhi perilaku pemahaman masyarakat

itu sendiri sehingga pelaksanaan lorong wisata ini dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan pemerintah dan masyarakat sekitar.

2. Proses

Indikator ini untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Dalam hal ini mengukur pelaksanaan program lorong wisata di Kota Makassar, apakah sudah berjalan dan efektif dengan baik atau masih terdapat kendala.

Hadirnya program Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, yakni Lorong Wisata, diapresiasi dan dinilai membuat kesadaran masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Pemerintah Kota Makassar menyiapkan Rp 170 milyar yang anggarannya bersumber dari 36 dinas dan badan, 15 kecamatan serta 12 bagian Sekertaris Daerah (Setda) untuk mendukung penuh lorong wisata dengan 114 program kegiatan.

Pengembangan lorong wisata dilakukan pada lorong tersebar pada 15 kecamatan di Kota Makassar. Untuk lorong wisata percontohan ini, pihak kecamatan-lah yang menentukan lorong mana saja yang akan dikembangkan.

Berikut hasil wawancara dengan Lurah Buakana Kecamatan Rappocini terkait kesesuaian visi dan misi lorong wisata:

“Lorong wisata itu kan kebijakan Walikota yang dimana membuat program sesuai visi misinya merestorasi nasib rakyat melalui tata lorong kota dengan menciptakan lorong produktif, artinya lorong produktif itu lorong yang bersifat ada manfaatnya. Jadi apa intinya pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan tujuan serta visi dan misi program tersebut.” (Wawancara dengan BA tanggal 24 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa implementasi program lorong wisata di Kelurahan Buakana diterapkan sesuai dengan tujuan serta visi dan misi program tersebut sehingga program lorong wisata dapat berjalan baik dan efektif.

Pengembangan lorong wisata merupakan suatu langkah yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan kota yakni terwujudnya kehidupan kota yang ekonomis, ekologis, dan kehidupan sosial-budaya yang berkelanjutan. Selain itu, sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk dapat lebih peduli akan lingkungan tempat tinggalnya. Semakin baik kualitas lingkungan tempat tinggal, maka masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut akan semakin bahagia karena didukung dengan lingkungan yang nyaman, indah, dan asri.

Sosialisasi dalam sebuah kebijakan atau program pemerintah kemasyarakatan adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Sebab, darisana masyarakat dapat mengambil atau memetik pemahaman atas sebuah produk kebijakan pemerintah yang ada. Perumusan kebijakan tanpa adanya sosialisasi, adalah sesuatu yang mustahil untuk mengharapkan keberhasilan suatu program pemerintah. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai program pemerintah sepatutnya dilakukan agar masyarakat tahu bahwa adanya lorong wisata dapat membuat masyarakat semakin antusias untuk ikut serta dalam pelaksanaannya, menjelaskan bagaimana program Lorong Wisata dan apa yang ingin dicapai dari program tersebut. Seperti yang diungkapkan salah

satu Ketua RW di Kelurahan Buakana terkait program lorong wisata dengan kebutuhan masyarakat:

“Kami dari pihak lorong sangat mengapresiasi program Bapak Walikota ini karena sifatnya mengarahkan kepada masyarakat itu sendiri bagaimana menciptakan, merawat lorong menjadi indah. Namun dari berbagai kerjasama pemerintah dan instansi, perlu adanya observasi kecocokan akses, lahan, tanah dan karakter masyarakat karena di Kelurahan Buakana ini sangat padat lorongnya.” (Wawancara dengan AW tanggal 24 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan lorong wisata ini seperti yang membutuhkan kajian lebih dalam dalam mengelola akses ruang yang sempit, mencocokkan karakter masyarakat untuk senantiasa bisa bekerjasama dengan pemerintah serta dalam pelaksanaannya tidak adanya ketergantungan antara pemerintah dan instansi terkait sebagai kerjasamanya.

Dalam hal ini, Kelurahan mempunyai tugas untuk terjun langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya kebijakan lorong wisata tentang pembenahi lorong dan membangkitkan keterampilan masyarakat. Sosialisasi, informasi dan komunikasi yang sudah jelas, dapat mempermudah kebijakan lorong wisata berjalan dengan baik.

Implementasi yang efektif akan terjadi apabila para pembuat keputusan atau kebijakan sudah mengetahui apa yang mereka akan kerjakan. Selain itu kebijakan yang disosialisasikan harus tepat, jelas dan konsisten agar masyarakatpun bisa melihat panutan baik kepada pemerintah itu sendiri sehingga apa yang diharapkan untuk kesuksesan kebijakan dapat berjalan dengan baik dengan kerjasama pemerintah dan masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu warga di Kelurahan

Buakana:

“Program lorong wisata merupakan program yang sangat penting dalam mewujudkan Makassar Ta Tidak Rantasa. Karena selama ini selama adanya program ini warga sering membuang sampah di sembarang tempat, tidak tertata, saluran air selalu macet, sering banjir di musim hujan dan lorong kurang menarik, terkesan gelap di malam hari karena tidak ada penerangan lampu, tembok kotor penuh coretan. Tetapi dengan adanya program ini masyarakat secara tidak langsung sadar tentang kebersihan dan keindahan, sehingga program ini perlu mendapat simpati yang terus menerus” (Wawancara dengan HT, tanggal 17 Mei 2023).

Hasil wawancara ini memberikan makna bahwa masyarakat telah memberikan partisipasi yang nyata atas program lorong wisata sebagai program andalan pemerintah yang harus disosialisasikan dengan nyata, di mana partisipasi masyarakat dalam menjaga, memelihara dan memperhatikan lingkungan lorongnya menjadikan Makassar tidak rantasa lagi.

Upaya pengembangan program lorong wisata melibatkan berbagai komponen, elemen atau unsur di dalamnya yang saling terintegrasi dan berpengaruh terhadap keberlanjutannya. Strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan program lorong wisata yaitu pendekatan berdasarkan dimensi keberlanjutan pengembangannya. Hal ini sangat penting dilakukan karena dapat memberikan informasi atau gambaran tentang aspek atau indikator yang dapat mempengaruhi upaya pengembangan potensi lorong yang ada di Kota Makassar.

3. Output

Output, yaitu mengukur tingkat keberhasilan atau hasil yang dapat dicapai pemerintah Kota Makassar dan bermanfaat bagi masyarakat di lorong wisata.

Aparat kelurahan sebagai layanan terdepan kepada masyarakat pada pemerintah kota, perlu menguasai program yang dicanangkan oleh pemerintah kota. Pengetahuan tentang program itu sendiri dan kemampuan mengajak warganya untuk menjalankan program tersebut sangat penting dikuasai oleh aparat kelurahan.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Program lorong wisata menjadi gerbang bagi program strategis lain milik pemerintah Kota Makassar. Dari sana, akan memberi peluang banyak inovasi muncul untuk pembangunan Makassar. Program yang dicetuskan oleh Walikota Makassar Danny Pomanto ini diibaratkan sebuah sel penentu apakah badan itu sehat atau sakit. Jika lorong wisata berhasil, daerah pun nampak kuat perekonomiannya dan kesejahteraannya, begitu maksudnya. Maka, pembangunan lorong wisata pun dioptimalkan oleh pemerintah bersama masyarakat.

Program pengelolaan lorong saat ini menjadi penting dan menjadi konsep utama yang memadukan antara konsep taman, konsep kebersihan, konsep akses dan konsep kepentingan yang di dalamnya menjadikan lorong sebagai akses utama untuk melakukan kegiatan pembangunan di Kota Makassar. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pengelolaan lorong wisata, peneliti melakukan wawancara dengan Lurah Buakana Kecamatan Rappocini terkait dampak yang dihasilkan daripada lorong wisata:

“Dampak positif dirasakan oleh pemerintah dalam hal ini kecamatan dan jajaran kelurahan yang secara kontinyu terjun langsung dalam melakukan pembenahan lorong yang ada di Kota Makassar, seperti lorong yang ada di Kelurahan Buakanan Kecamatan Rappocini, di mana setiap lurah saya perintahkan untuk memperhatikan betul program lorong wisata, industri lorong melibatkan setiap warga masyarakat untuk memperhatikan lorong kita semua.” (Wawancara dengan BA tanggal 24 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa program lorong wisata memberikan dampak positif bagi lingkungan masyarakat lorong di Kelurahan Buakana, sehingga program ini perlu diterapkan dengan baik melalui dukungan pemerintah setempat dan masyarakat.

Program mengenai lorong wisata yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Makassar adalah program yang harus disampaikan kepada warga melalui pihak kelurahan. Disisi lain dari pemahaman aparat kelurahan tentang program tersebut perlu dikuasai agar aparat kelurahan dapat menjelaskan apa tujuan dari program lorong wisata tersebut. Program yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Makassar, langsung disampaikan ke seluruh SKPD yang ada dikota makassar untuk dijalankan. Jumlah aparat kelurahan juga memegang peranan penting dalam menjalankan program ini dengan kerjasama intansi

terkait dalam mensukseskan program lorong wisata ini sehingga implementasi kebijakan lorong wisata di Kelurahan Buakana akan berjalan dengan baik. Seperti yang diungkapkan salah satu Ketua RW di Kelurahan Buakana terkait program lorong wisata dengan kebutuhan masyarakat:

“Bentuk nyata dari keterlibatan pemerintah (SKPD) yaitu setiap malam jam 8 ke atas, kami mengangkut sampah masyarakat pada setiap lorong, menyediakan tempat sampah dan membangun berbagai fasilitas yang menyebabkan got-got lorong bersih, menyediakan bibit tanaman hias, tanaman obat-obatan.” (Wawancara dengan AW tanggal 24 Mei 2023).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa program ini telah dilaksanakan oleh pihak SKPD Pemerintah yang saling terkait untuk mengangkut sampah-sampah dan melakukan pembersihan di setiap lorong dan melakukan kegiatan pengindahan dan kebersihan lorong dengan melakukan penanaman tanaman hias yang melibatkan yang juga melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk menopang program ini.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu ketua RT di Kelurahan Buakana:

“Lorong saya dulunya kotor, gelap, dan becek. Dengan program yang dicanangkan oleh Walikota ini lorong kami sudah bersih, di mana setiap pagar warga telah mengecat, gorong-gorong telah dibersihkan, disediakan tempat sampah, di setapak jalan telah ditanami tanaman hias, warga masyarakat telah berpartisipasi menanam bibit tanaman lombok di pekarangan rumah. Jadi lorong saya sekarang sudah ceria, bersih, singara, dan menjadi sumber pendapatan” (Wawancara dengan NA, tanggal 17 Mei 2023).

Hasil wawancara di atas memberikan makna bahwa kondisi lorong yang hampir sebagian besar yang ada di Kota Makassar saat ini kondisi lorongnya sudah bagus dan menjadi lorong percontohan di mana melibatkan

pemerintah, stakeholder dan masyarakat berpartisipasi menyukseskan program pengelolaan lorong dengan baik, dalam menopang Kota Makassar sebagai kota dunia.

Salah satu tujuan dari program lorong wisata adalah sebagai upaya pemulihan dan peningkatan perekonomian warga Makassar, yaitu dengan memaksimalkan potensi setiap lorong atau daerah. Termasuk dengan mengoptimalkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di setiap lorong. Di setiap kelurahan, akan ada lorong atau area yang menjadi andalan. Di sana menjadi tempat eksplorasi potensi daerah yang bersinergi. Dikembangkan pula peternakan yang limbahnya bisa jadi pupuk untuk perkebunan rumahan. Nanti bila saatnya panen, sayur mayur akan dijual dengan menggunakan motor berkeliling komplek. Dengan sayur mayur dari kebun sendiri pula, potensi bisnis kuliner di daerah ini bisa dikembangkan dengan mudah.

Ciri khas kebanyakan desa wisata adalah banyaknya dinding yang dihias dengan lukisan warna-warni. Dalam proses pengembangan lorong wisata, permainan warna yang menarik menjadi salah satu aspek penting untuk diterapkan. Misalnya dengan pengaplikasian pada seni mural, *doodle*, dan *lettering*. Sehingga kreasi warna-warni, membuat lorong wisata menjadi semakin sedap dipandang mata.



Gambar 4.1 Lorong wisata

Sehubungan dengan pernyataan diatas, bahwa keberhasilan suatu program pemerintah terkhusus lorong wisata dilihat bagaimana dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Namun perlu diketahui kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaiknya jika kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti harus merogok kocek masyarakat melalui swadaya pembelian bahan dan sebagainya akan kurang mendapat dukungan. Tergantung bagaimana kesadaran masyarakat itu sendiri.

Banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk senantiasa mensejahterahkan rakyatnya, termasuk pembuatan program-program yang dapat mengatasi masalah kemasyarakatan yang ada pada lingkungan. Sebab, lingkungan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun sosio-psikologis, termasuk didalamnya adalah belajar.

Program lorong wisata di Kota Makassar memberikan dampak positif/baik akan manfaat yang telah dirasakan oleh berbagai pihak. Dampak

yang ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perubahan lingkungan (lorong) yang dulunya kumuh, bau, sampah bertebaran dimana-mana, sekarang dengan adanya program lorong wisata lingkungan berubah menjadi bersih, indah dipandang dan produktif.

C. Pembahasan

Setelah menguraikan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan maka peneliti akan menguraikan analisa sesuai rencana penelitian mengenai Efektivitas Program Lorong Wisata di Kota Makassar. Sebagaimana dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987) bahwa untuk mengukur efektivitas menggunakan 3 indikator yaitu, input, proses, dan output.

1. Input

Suatu program tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerja sama baik dari masyarakat maupun pemerintah. Pada implementasi program pemerintah terkadang terjadi kendala karena kurangnya kesadaran masyarakat namun dapat ditangani melalui sosialisasi yang efektif dari aparat pemerintah yang kepada masyarakat sehingga program lorong wisata dapat berjalan dan diterapkan dengan baik di Kota Makassar khususnya di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa program lorong wisata dinilai bagus dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lorong-lorong yang ada di Kota Makassar, namun kurangnya pendidikan sebagian masyarakat diberbagai lorong mempengaruhi keikutsertaan mereka dalam mensukseskan program, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang efektif

kepada masyarakat. Program lorong wisata merupakan kebijakan yang tepat saat untuk menata lorong-lorong yang ada di Kota Makassar guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat. Tentu persoalan ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah, melainkan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai teori yang diungkapkan Martani & Lubis (1987) yang menyatakan bahwa mengukur efektivitas mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Lorong Wisata merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Makassar. Tujuan dari pada lorong wisata ini ialah untuk menciptakan lorong produktif, memanfaatkan lorong yang ada di Kota Makassar menjadi lebih produktif, inovatif dan ramah lingkungan. Inovasi ini diapresiasi dan dinilai dapat membuat kesadaran masyarakat lorong untuk menciptakan kebersihan lingkungannya dan hal-hal positif lain dari penerapan konsep lorong wisata. Program ini dimaksudkan untuk menciptakan lorong produktif dan memperbaiki kondisi lorong-lorong di Kota Makassar. Lorong yang biasanya kumuh dan sering menjadi sumber penyakit sosial, ingin diubah menjadi lorong yang asri, sejuk, indah, bahkan ditargetkan menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat.

2. Proses

Program Lorong Wisata di Kota Makassar berjalan dengan baik karena setiap lorong yang ada di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Rappocini sangat antusias dengan program pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

program lorong wisata telah efektif dan diimplementasikan sesuai dengan tujuan serta visi dan misi program tersebut.

Pemerintahan Kota Makassar mulai melakukan sebuah langkah pembenahan yang secara signifikan untuk mengatasi masalah lingkungan Kota Makassar sendiri adalah ruang yang sempit karena sebagian besar masyarakat bermukim di kawasan lorong. Upaya pengembangan program lorong wisata melibatkan berbagai komponen, elemen atau unsur di dalamnya yang saling terintegrasi dan berpengaruh terhadap keberlanjutannya. Strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan program lorong wisata yaitu pendekatan berdasarkan dimensi keberlanjutan pengembangannya. Hal ini sangat penting dilakukan karena dapat memberikan informasi atau gambaran tentang aspek atau indikator yang dapat mempengaruhi upaya pengembangan potensi lorong yang ada di kota Makassar. Hal ini sesuai teori yang diungkapkan Martani & Lubis (1987) yang menyatakan bahwa dalam mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya dengan melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan perkotaan yang kebanyakan tumbuh dari spasial lorong, maka wajah kota yang dahulu terkesan kotor, semrawut, dan kumuh. Saat ini terlihat lebih indah, rapi, bersih dan tertata dengan hadirnya konsep lorong wisata. Konsep lorong wisata merupakan salah-satu bagian integral dari program pemerintah Walikota Makassar. Dampak yang dirasakan oleh sejumlah pihak terutama masyarakat dalam pelaksanaan program lorong wisata di Kota Makassar memberikan dampak yang sangat positif/baik, sebab

berbagai dampak dan manfaat yang dirasakan oleh sejumlah pihak baik dari aspek lingkungan yang terlihat bersih, sejuk, asri, dan nyaman maupun ekonomi.

3. Output

Program lorong wisata di Kota Makassar memberikan dampak positif/baik akan manfaat yang telah dirasakan oleh berbagai pihak, sehingga program ini perlu diterapkan dengan baik melalui dukungan pemerintah setempat dan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perubahan lingkungan (lorong) yang dulunya kumuh, bau, sampah bertebaran dimana-mana, sekarang dengan adanya program lorong wisata lingkungan berubah menjadi bersih, indah dipandang dan produktif. Program ini telah dilaksanakan oleh pihak SKPD Pemerintah yang saling terkait untuk mengangkut sampah-sampah dan melakukan pembersihan di setiap lorong dan melakukan kegiatan pengindahan dan kebersihan lorong dengan melakukan penanaman tanaman hias yang melibatkan yang juga melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk menopang program ini.

Setelah pandemi tahun 2021, begitu banyak program strategis dari pemerintah kota Makassar, pertama adalah program lorong wisata. Program ini bertujuan untuk memulihkan pendidikan dengan mendukung hak anak yang putus sekolah, Kedua, penyediaan sumber daya sarana dan prasarana, pemerintah Kota Makassar mengeluarkan anggaran 300 triliun lebih untuk mendukung pembangunan tol layang, perluasan bandara Soekarno Hatta dan lainnya. Ketiga, perluasan *networking*, pemerintah kota Makassar telah menjalin

kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi (Ulfiah Syukri et al., 2022)

Banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk senantiasa mensejahterakan rakyatnya, termasuk pembuatan program-program yang dapat mengatasi masalah kemasyarakatan yang ada pada lingkungan. Sebab, lingkungan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun sosio-psikologis, termasuk didalamnya adalah belajar (Tumanggor, Rusmin. dkk, 2010). Lingkungan kebijakan, seperti adanya pengangguran, kriminalitas, krisis ekonomi, gejolak politik yang ada pada suatu Negara akan mempengaruhi atau memaksa pelaku atau aktor kebijakan untuk meresponnya, yakni memasukkan kedalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Ernaya (2019) yang menyatakan bahwa dalam menjalankan program pemerintah pentingnya perhatian dari aparat pemerintah bahwasanya keberhasilan suatu program juga dilihat bagaimana peran pemerintah dan tokoh masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dan berpartisipasi. Agar masyarakat itu sendiri termotivasi yang secara tidak langsung bersamaan suksesnya suatu kebijakan atau program pemerintah.

Implementasi yang efektif akan terjadi apabila para pembuat keputusan atau kebijakan sudah mengetahui apa yang mereka akan kerjakan. Selain itu kebijakan yang disosialisasikan harus tepat, jelas dan konsisten agar

masyarakatpun bisa melihat panutan baik kepada pemerintah itu sendiri sehingga apa yang diharapkan untuk kesuksesan kebijakan dapat berjalan dengan baik dengan kerjasama pemerintah dan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait efektivitas program lorong wisata di Kota Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa program lorong wisata dinilai bagus dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lorong-lorong yang ada di Kota Makassar, namun kurangnya pendidikan sebagian masyarakat diberbagai lorong mempengaruhi keikutsertaan mereka dalam mensukseskan program, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Pemerintahan Kota Makassar mulai melakukan sebuah langkah pembenahan yang secara signifikan untuk mengatasi masalah lingkungan Kota Makassar sendiri adalah ruang yang sempit karena sebagian besar masyarakat bermukim di kawasan lorong. Upaya pengembangan program lorong wisata melibatkan berbagai komponen, elemen atau unsur di dalamnya yang saling terintegrasi dan berpengaruh terhadap keberlanjutannya. Strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan program lorong wisata

yaitu pendekatan berdasarkan dimensi keberlanjutan pengembangannya. Program lorong wisata di Kota Makassar memberikan dampak positif/baik akan manfaat yang telah dirasakan oleh berbagai pihak, sehingga program ini perlu diterapkan dengan baik melalui dukungan pemerintah setempat dan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perubahan lingkungan (lorong) yang dulunya kumuh, bau, sampah bertebaran dimana-mana, sekarang dengan adanya program lorong wisata lingkungan berubah menjadi bersih, indah dipandang dan produktif.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Makassar diharapkan lebih aktif lagi dalam hal menjaga semangat motivasi masyarakat dan aparat pemerintah untuk dapat melanjutkan dan mengembangkan program lorong wisata secara berkelanjutan.
2. Pemerintah dan masyarakat harus mampu sejalan dengan optimalisasi sosialisasi dari tingkat atas ke bawah dengan melakukan terjun langsung *door to door*. Pengawasan pemerintah setempat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat harus dirutinkan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat.
3. Pemerintah harus bisa menegakkan sanksi dalam undang-undang sehingga masyarakat merasa terawasi. Pemerintah harus aktif menjalin kerjasama dengan semua elemen baik organisasi masyarakat, swasta, dan utamayan masyarakat sehingga program lorong wisata bukan menjadi kewajiban dari petugas tapi semua elemen ikut aktif di dalamnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2017). *Sustainability of ecology and economic of urban farming development : Case Study In Makassar City, South Sulawesi Province*. *Eco.Env. & Cons.* 23(1) : 125-130
- AG. Subarsono. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, A. K. (2019). Penggunaan Port Management System (PMS) Dalam Proses Perencanaan Waktu Bongkar Muat Kapal Untuk Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Pada PT. Varia Usaha Bahari Gresik.
- Ansarullah, Abdul Kadir, L. O. M. (2019). Efektivitas Organisasi Pemerintahan Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara. *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*. Vol.10. No.1 Tahun 2019 *Efektivitas*. 10(1). Pp. 1–9.
- Budi. Winamo, MA. (2007). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress.
- Budo, A. & Tampi, F. (2020). Efektivitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado.
- Dian Ernaya. (2019). Transformasi Program Lorong Wisata (Longgar) Di Kota Makassar.
- Ernaya, D. (2019). Transformasi Program Lorong Wisata (Longgar) di Kota Makassar. Skripsi. Fakultas Ilmu dan Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Erwin Z.G. & Yosef. P. K. (2016). *Pengelolaan Danau Limboto dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hardiyanti, D.S Purnamasari, A.C (2019). Efektifitas Aplikasi Smartcity Pada Pengguna Smartphone Untuk Mewujudkan Kota Nyaman Untuk Semua Di Kota Makassar. *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* (<http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/index>). Submission ID: 7603.
- Harnida. (2012). Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset di Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Indriastuti, D. R. (2012). Efektivitas Organisasional. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*.12(1). Pp. 22–36.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Mardiah & Baiq Rhinelda, E. J. (2018). Efektifitas Pelayanan Penjualan Tiket Penyeberangan Dari Bangsal Menuju Tiga Gili. 6(2). Pp. 93–104.

Martini & Lubis. (1987). *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.

Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nahriah, N. (2020). Efektivitas Diklat Karya Tulis Ilmiah Terhadap Kompetensi Menulis Widyaiswara. 8(1). Pp. 353–365.

Othenk. (2008). Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas. Tersedia di <http://literaturbook.blogspot.co.id> (diakses tanggal 2 Juli 2022)

Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Rahmat. (2017). “Lorong Wisata” (Suatu Analisa Terhadap Kebijakan Walikota Makassar Di Kelurahan Pa’baeng-Baeng Kecamatan Tamalate). Skripsi. Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.

Rudini, A. (2017). Kerjasama Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Penataan Lorong Wisata (Longgar) Di Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kota Makassar. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sartika, D. (2017). Analisis Pengelolaan Lorong Wisata (Longgar) Di Kota Makassar. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin Makassar.

Sidik, A. (2005). *Paradigma Islam dan Transformasi Sosial*. Jurusan Ushuluddin. Vol.2 No.3.

Soares, Armando dkk. 2015. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol: 4. Nomor 2. ISSN: 2442-6962). <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/download/102/137>.

Solichin A.W. (2005). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

- Syarifuddin, J. (2015). *Ilmu Politik Profetik*. Lab. Ilmu Politik Uin Aalauddin Makassar.
- Tumanggor, Rusmin, dkk. (2010). *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta, Kencana.
- Waliulu, M. & Sampara Lukman, K. (2020). Efektivitas Penerapan E- Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku.12. Pp. 817–826.
- Wisneni, A, Abdullah, & Boceng. A. (2020). Keberlanjutan Pengembangan Lorong Wisata Dalam Mewujudkan Kawasan Perkotaan Ramah Lingkungan (Eco City) Di Makassar. *Jurnal Agrotek* Vol. 4 No. 2.
- Ulfiah Syukri et al., (2022). Strategi Penguatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Makassar Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, Vol .VII, No.02.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 Tentang RTRW Kota Makassar Tahun 2005-2015
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bahrul alamsyah, A.Md (Lurah Buakana)



Wawancara dengan Awaluddin (Ketua RW 07 Kelurahan Buakana)



Wawancara dengan Nurnaningsih (Ketua RT 01 Kelurahan Buakana)